

4 Kecamatan Perkotaan Ini Jadi Fokus Penanganan Stunting Pemkab Bogor

CIBINONG (IM)—Penanganan bayi stunting oleh Pemkab Bogor difokuskan di 10 desa atau kelurahan, di 4 kecamatan yaitu Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri dan Cileungsi. Sebelumnya, dengan upaya yang lebih luas, Pemkab Bogor menangani bayi stunting di 104 desa atau kelurahan dan 36 kecamatan.

Dengan upaya tersebut, Pemkab Bogor pun berhasil menurunkan angka bayi stunting ke angka 4,7 persen dari 9 persen atau 16.000 bayi atau balita. “Kami menargetkan Kabupaten Bogor bisa 0 kasus bayi stunting, hingga kami memfokuskan penanganan bayi stunting di 4 kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri dan Cileungsi,” kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan kepada wartawan, Selasa (4/7).

Iwan Setiawan menuturkan bahwa penanganan bayi stunting dikerjakan bersama oleh

12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mulai dari BPKAD, DPUPR, Dinkes, Distandhorbun, Diskanak, DKP, Dinsos dan lainnya. Mengenai anggaran agar Kabupaten Bogor nol kasus bayi stunting, Pemkab Bogor pun menyiapkan anggarannya baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor maupun APBD Provinsi Jawa Barat. “Anggarannya Rp 24 miliar dari Pemprov Jabar Barat dan sekitar Rp 170 miliar dari APBD Kabupaten Bogor,” tutur Iwan.

La melanjutkan anggaran tersebut bakal disebar ke 12 SKPD, dan hari ini ia pun menandatangani komitmen atau fakta integritas dengan Kepala SKPD terkait untuk menjadi program kerja di 4 kecamatan yang masuk dalam wilayah perkotaan. ●gio

BUNTUT TEMUAN BPK

Banyak Aset Pemkab Bogor Jadi Rumah dan Tempat Usaha

CIBINONG (IM)—Pengelolaan aset-aset milik Pemkab Bogor yang tak dikelola dengan baik jadi keprihatinan tokoh muda Kecamatan Cibinong, salah satunya Yudhizar.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat pun melaporkan hasil pemeriksaannya atas pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2022, di mana lahan seluas 1 hektare di samping Terminal Cibinong dimanfaatkan pihak swasta, tanpa ada kerjasama dan penyeteroran pendapatan ke pemerintah daerah.

Yudhizar mengatakan bahwa banyak aset Pemkab Bogor yang tidak jelas pengelolannya, hingga dijadikan rumah dan tempat usaha oleh oknum-oknum masyarakat. Ia pun meragukan, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memiliki surat kerjasama dengan oknum masyarakat tersebut dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ada aset lahan Pemkab Bogor seluas 940 meter di Kelurahan dan Kecamatan Ciyang tercatat sebagai sarana pendidikan, namun bertahun-tahun dimanfaatkan oknum masyarakat den-

gan membangun rumah dan tempat usaha. Curangnya, plang aset Pemkab Bogor tersebut ditutupi bangunan usaha hingga kami khawatir suatu saat aset tersebut diakui oleh oknum masyarakat tersebut,” kata Yudhizar kepada wartawan, Senin kemarin.

Politisi PDI Perjuangan dan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor itu pun menambahkan, di Kelurahan yang sama yaitu Cibinong, juga ada aset yang menjadi tempat usaha.

“Aset Pemkab Bogor lainnya malah jadi peternakan ayam, usaha cuci steam, usaha makanan dan lainnya. Apakah usaha-usaha tersebut menyeterorkan pendapatannya ke Pemkab Bogor dan apakah ada perjanjian kerjasamanya atau hanya menguntungkan segelintir oknum pejabat pemerintah saja,” tambahnya.

Yudhizar melanjutkan, bahwa pengelolaan aset pemerintah daerah yang tidak semestinya tersebut bisa saja ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Jika saja ada aturan yang dilanggar dan ada unsur pidana korupsi, maka saya harapkan aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan,” lanjut Bandit sapaan akrabnya. ●gio

Penderita HIV/AIDS Imbau Pasangan Tidak Berperilaku Seks Menyimpang



Testimoni dua orang terinfeksi HIV/AIDS.

BOGOR (IM)— Dua orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Bogor, mengimbau agar pasangan tidak berperilaku hubungan intim menyimpang, dan juga jangan suka ganti-ganti pasangan.

Mereka sampai sekarang masih merasakannya tentang penyakit HIV/AIDS yang dideritanya dan belum berani menyampaikan secara terbuka di lingkungan dan pergaulannya. Tujuannya, agar mereka tidak tidak terstigma dan didiskriminasi orang lain. Sehingga keduanya masih (open status) tentang positif penyakit yang belum ada obatnya ini.

Hal ini diakui oleh Lembaga Kajian Strategis Bogor (Le-kas) saat menggelar testimoni HIV/AIDS dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional, di Hotel Rijen Pajajaran Kota Bogor, Senin (3/7). Direktur Mucksin Zaenal Abidin mengatakan selama ini mereka terus melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi terkait dengan HIV/AIDS.

Karenanya pada kegiatan ini, ia menyampaikan berbagai capaian upaya yang telah dilakukan lembaga secara khusus dalam ikut membantu penanganan penyakit yang belum ada obatnya itu. Pada kesempatan ini kedua orang yang terinfeksi HIV/AIDS sebut saja Rio dan Mei, mereka mengaku dinyatakan positif HIV/AIDS padahal sejak awal tidak ada gejala, namun dirasakan berat

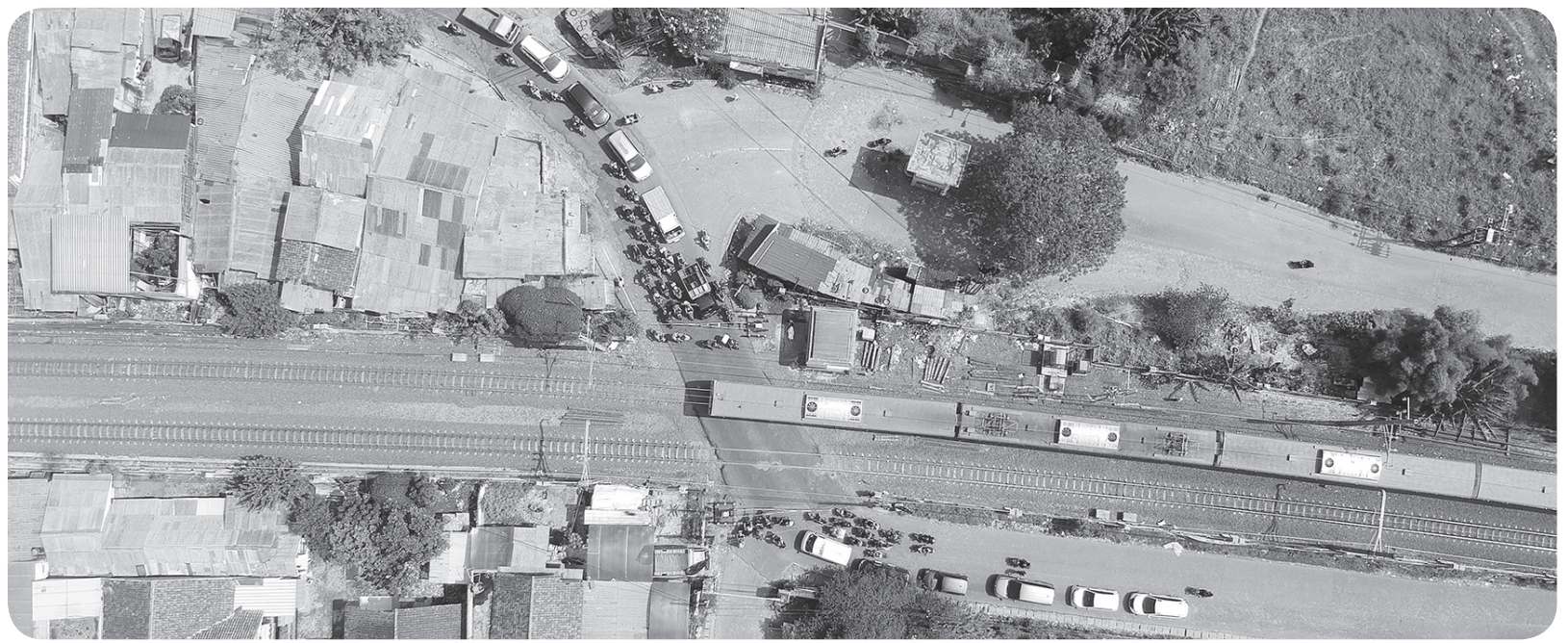
badan terus mengalami penurunan drastis, dan tidak ada nafsu makan.

Mereka mengakui, gejala awal diare berkepanjangan dan akhirnya badan mulai terasa demam, tenggorokan, badan lemas. Atas sikap berkepanjangan tersebut mereka memeriksakannya rumah sakit, dan terakhir tes darah dan akhirnya mereka dinyatakan positif HIV/AIDS. Setelah secara positif hasil pengecekan, Mei menyampaikan kabar menyakitkan itu ke keluarga besar dan keluarga marah bahkan seakan tidak terima atas kabar buruk terinfeksi HIV/AIDS.

Mei juga selama 10 hari diisolasi di rumah seraya diberikan obat anti-retroviral (ARV). Sejak terus mengonsumsi obat itu, badan sehat dan kembali semangat untuk hidup lagi. “Pada kesempatan ini, kami meminta para suami untuk berhubunganlah secara baik dan normal, jangan suka ganti-ganti pasangan,” ujarnya.

Sebab seperti dirinya, sebagai ibu rumah, secara rutinitas tidak pernah melakukan perbuatan apapun artinya hidup selama ini hanya mengurus rumah, anak dan kerja kantor. Cukup Mei dan Rio saja yang menjadi korban HIV/AIDS, jangan coba-coba berganti-ganti pasangan, dan jangan berperilaku hubungan intim menyimpang, ujarnya. ●gio

8| Nusantara



PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API

Foto udara KRL melintas di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/7). Berdasarkan data PT KAI hingga Mei 2023 terjadi 1.782 musibah kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, dengan jumlah perlintasan sebidang sebanyak 3.849 titik terdiri dari 1.447 titik dijaga dan 2.259 titik tidak dijaga.

Plt Bupati Bogor Geram Oknum Satpol PP Jaga Ditemani Miras

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebut, permasalahan anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang kedapatan pesta miras seharusnya sudah selesai. Hal ini karena yang terlibat perbuatan melanggar aturan tersebut dilakukan oleh anggota Outsourcing, bukan PNS. Karena dengan perbuatannya yang melanggar aturan ini, para anggota Satpol-PP Kabupaten Bogor ini memang ingin berhenti bekerja.

CIBINONG (IM)— Plt Bupati Bogor menyebut Kasatpol PP tak usah bertele-tele dalam mengambil sikap terhadap anggotanya yang kedapatan pesta minuman keras (Miras) saat sedang jaga malam di pos penjagaan halaman Pemkab Bogor.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebut, permasalahan

anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang kedapatan pesta miras seharusnya sudah selesai, hal ini karena yang terlibat perbuatan melanggar aturan tersebut dilakukan oleh anggota Outsourcing, bukan PNS.

Iwan pun mengaku, ia telah memanggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor untuk menegakkan aturan sesuai dengan aturan

kerjasama. Yang mana, menurutnya perjanjian kerja tersebut dibuat oleh yang bersangkutan dengan Kasatpol PP sendiri.

“Di dalam kerjasama antara OS dengan Kasatpol PP kan ada, itu gak perlu bertele-tele lah,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (4/7).

Menurut Iwan, dengan perbuatan pesta miras di tengah berjaga, para oknum Satpol-PP tersebut tidak perlu diberhentikan. Karena dengan perbuatannya yang melanggar aturan, para anggota Satpol-PP Kabupaten Bogor ini memang ingin berhenti bekerja.

“Dia itu tidak dipecat, dia itu tidak diberhentikan, dia yang pengen berhenti gitu istilahnya. Kan dia sebelum dia kontrak dia kan tanda tangan dulu, tak akan meminum minuman keras dan semacamnya, jadi dia yang pengen berhenti, kami hanya tinggal menyederkan perjanjian kerja itu, Kita baca dia pengen ber-

henti aja” terangnya.

Iwan pun menegaskan, dalam mekanisme kerja untuk anggota Outsourcing, anggota Satpol-PP Kabupaten Bogor perlu menandatangani perjanjian kerja di setiap tahunnya. “Januari, dia menyatakan siap, jadi itu mah keinginan dia. Jadi jangan bertanya kami harus apa, kecuali ASN ya, ASN mungkin ada tahapan dan mungkin kami akan berstatement banyak. Kali ini kan OS, OS itu kan setiap tahun harus tanda tangan,” tuturnya.

Lagi dan lagi, Plt Bupati Bogor ini mengucapkan, perbuatan pesta miras di saat sedang bertugas tersebut adalah sikap bahwa para anggota Satpol-PP Kabupaten Bogor ini memang ingin berhenti bekerja.

“Dia berhenti sendiri. Karena disodori perjanjiannya dia berhenti, (isi perjanjian) saya akan berhenti bila mana melakukan (hal-hal yang melanggar), dia melakukan,

berarti dia pengen berhenti,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar video diduga anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang tengah bertugas malam asik ditemani dua botol minuman keras (miras). Dari video yang diterima, nampak beberapa orang yang diduga anggota Satpol PP tengah asyik duduk di salah satu Pos Jaga sembari ditemani dua botol miras.

Sedikitnya, ada 4 orang yang nampak dalam video tersebut Oknum Satpol PP Kabupaten Bogor berjaga ditemani miras. Bahkan seorang yang diduga anggota Satpol PP ini menaikkan kakinya ke atas meja sembari memvideokan suasana di pos jaga tersebut. Dari suasana pos jaga, diketahui video tersebut di ambil di salah satu pos jaga yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. ●gio

Relaksasi Pajak Tahun Ini, Warga Kab. Bogor Dapat Dobel Promo

BOGOR (IM)— Untuk meningkatkan masyarakat Kabupaten Bogor sadar pajak, Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi dengan Samsat Kabupaten Bogor dan Jasa Raharja.

Mereka menyediakan promo Bebas Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui kegiatan Samsat Weekend yang rutin dilaksanakan setiap minggu di Stadion Pakansari, Cibinong mulai 3 Juli hingga 31 Agustus 2023.

Perlu diketahui, program Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 ini diperuntukkan bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jabar dan Metro Jaya. Kemudian Badan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa di Jawa Barat.

Untuk Bebas BBNKB yakni pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua untuk seluruh masyarakat Jawa Barat yang melakukan balik nama.

Sementara untuk Diskon PKB yakni diskon pajak kendaraan bermotor khusus kendaraan yang menunggak lebih dari 7 tahun hanya membayar 3 tahun.

Kepala P3DW Kabupaten Bogor, Yadi Cahyadi mengatakan, untuk meningkatkan masyarakat Kabupaten Bogor taat pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor juga Samsat Kabupaten Bogor kembali menggelar relaksasi pajak melalui promo bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan.

“Relaksasi pajak ini jadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Bogor sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran pajak untuk masyarakat. Karena relaksasi pajak kali ini sangat spesial dari tahun sebelumnya. Karena ada dua promo sekaligus yakni bebas balik nama kendaraan bermotor juga diskon pajak kendaraan bermotor, yang akan dimulai dari 3 Juli 2023 hingga 31 Agustus 2023,” ungkap yadi melalui siaran langsung di Radio Teman 95,3 FM bersama

penyiar Abah Uus.

Kemudian, Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Bogor, Bas-kara mengungkapkan promo ini untuk meringankan beban pajak kendaraan masyarakat. Sehingga meminimalisir terjadinya penghapusan kendaraan karena tunggakan pajak. “Sehingga masyarakat wajib pajak, diberikan kemudahan untuk melakukan perpanjangan registrasi kendaraan bermotor dengan diskon yang disediakan,” tuturnya.

Selanjutnya, Anggota Unit Regident Samsat Kabupaten Bogor, Aipda Cecep S. Harit Pramudya mengungkapkan bahwa, relaksasi pajak ini akan berlangsung selama dua bulan terutama bagi masyarakat yang belum membaliknamakan kendaraannya, dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

“Promo ini bukan lumayan lagi tapi lumayan pisan banget. Yang akan melakukan balik nama silakan datang langsung ke Kantor Samsat Kabupaten Bogor. Untuk pelayanan keliling kami hanya melayani pajak tahunan, registrasi tahunan atau pengesahan,” jelasnya. ●gio



Bayar pajak tahun ini, masyarakat dapat doble promo.

Pemkab Bogor Dapat Predikat WDP dari BPK, DPRD Beri Sejumlah Catatan

CIBINONG (IM)— DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Ruang Rapat Paripurna. Salah satu agendanya adalah penyampaian rekomendasi tentang laporan keuangan Pemkab Bogor yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Pembacaan rekomendasi disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Irvan Baihaqi. Dia mengatakan telah membentuk panitia khusus untuk membahas itu.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Telah dilakukan rangkaian pembahasan di tingkat panitia khusus,” kata Irvan dalam sidang paripurna, Selasa (1/7).

“Kami sudah melaksanakan rapat lima hari. Setelah rapat pembahasan oleh panitia khusus, maka dengan ini panitia khusus Kabupaten Bogor membahas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 menyampaikan catatan dan rekomendasi,” tambahnya.

Catatan pertama yaitu kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atas temuan pajak hotel kurang dibayar sekitar Rp 308 juta. Kedua kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atas temuan pembangunan gedung olahraga masyarakat di Kecamatan Megamendung sebesar Rp 203 juta.

Selanjutnya kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), atas semua pembangunan gedung peruntukan gudang KPU sebesar Rp 261 juta. “Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas temuan realisasi belanja gedung dan bangunan untuk melaksanakan sarana dan prasa-

rana kawasan rest area tidak sesuai kontrak sebesar Rp 126 juta dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp 17,4 juta,” ucapnya.

Kemudian BPPD atas temuan realisasi belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa pekerjaan rumah hunian tetap tidak sesuai kontrak sebesar Rp 743 juta. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, atas temuan belanja dan gedung pekerja mal pelayanan publik tidak sesuai kontrak sebesar Rp 265 juta.

“Kecamatan Citeureup, atas temuan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk kantor kelurahan karang asem barat tidak sesuai kontrak sebesar Rp 31,1 juta, dan denda keterlambatan Rp 131,6 juta. Temuan tersebut telah dikembalikan sebesar Rp 31,1 juta,” tuturnya.

Kemudian Kecamatan Caringin atas temuan belanja pada gedung dan pelaksanaan pekerjaan Caringin tidak sesuai kontrak sebesar Rp 296,2 juta. Lalu ada Dinas PUPR atas temuan belanja modal untuk melaksanakan 3 paket pembangunan jalan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 6,94 miliar dan denda keterlambatan Rp 281,5 juta.

“Kemudian Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, panitia khusus telah berkoordinasi terkait penertiban barang milik daerah berupa aset tetap tanah dan kunjungan terhadap tanah seluas 14.700 hektare,” bebernya.

Irvan menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disusun oleh panitia khusus. Pertama yaitu dengan kekurangan pembayaran untuk segera dibayar paling lambat tanggal 28 Juli 2023. “Dua, memasukkan sanksi atas ketidakcermatan oleh jasa konsultan pengawas. Tiga, memblacklist konsultan pengawas yang tidak bisa bekerja sama dengan baik dan maksimal,” imbuhnya. ●gio